

# Polisi-Jaksa Adu Cepat Ungkap Kasus Rp 22 M

SEMARANG, TRIBUN - Polrestabes Semarang "adu cepat" dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dalam menangani raibnya uang Rp 22 miliar milik Pemkot Semarang.

Informasi yang dihimpun Tribun Jateng, mantan karyawan BTPN Semarang, Au atau DAK, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrim Polrestabes Semarang. Penyidik Reskrim secara maraton telah menggelar secara internal kasus raibnya uang negara ini pada Jumat (20/3) dan Sabtu (21/3).

Saat dikonfirmasi perihal penetapan DAK sebagai tersangka, Kapolrestabes Semarang Kombes Djihartono tidak membantahnya.

"Besok (Minggu- Red) akan kami ekspose secara resmi kepada wartawan. Jadi perta-

## STORY HIGHLIGHTS

- Polisi bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus hilangnya Rp 22 miliar dana deposito milik Pemkot Semarang
- Hari ini Polrestabes Semarang akan mengumumkan perkembangan penanganan kasus itu.
- Pelaku bisa dikenakan pasal berlapis.
- Sebelumnya Kejati Jateng juga akan menetapkan tersangka dalam kasus ini.

## NEWS ANALYSIS

**BUDI WISAKSONO**

KETUA PUSAT STUDI KEPOLISIAN UNDIP

# Jangan Ada Ego Institusi



Bagaimana isi gelar kasus dari Polrestabes Semarang soal dana Pemkot?

[tribunjateng.com](http://tribunjateng.com)

**KEJAKSAAN** Tinggi bisa menarik kasus raibnya dana Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar yang disimpan di BTPN.

Selama laporan tersebut

nyaannya besok saja ya," kata Kapolrestabes kepada Tribun Jateng, Sabtu (21/3).

Seorang sumber mengatakan, DAK dikenakan pasal berlapis. Di antaranya tindak pidana korupsi, pemalsuan tanda tangan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Polisi dalam waktu dekat juga akan memeriksa orang lain yang diduga sebagai "aktor" di balik pendepositoan uang pemkot ke sejumlah bank.

Ketika dikonfirmasi atas pasal yang menjerat DAK, Kapolrestabes Semarang belum bersedia membeberkan. "Besok saja akan saya terangkan," kata Kapolrestabes.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Hartadi, memberikan pernyataan bila dalam waktu dekat akan menetapkan DAK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Kami melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sudah sejak 2 Februari 2015. Saya perintahkan penyidik kerja cepat, DAK pasti tersangka. Tunggu saja 2-3 hari ini akan kami umumkan secara resmi," kata Hartadi,

Jumat (21/3).

Sumber lain mengungkapkan, DAK sengaja datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan "balasan" atas laporan yang masuk di Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. DAK melaporkan sejumlah pihak yang membantunya menghabiskan uang miliaran rupiah.

Keabsahan sertifikat deposito Pemkot Semarang senilai Rp 22 Miliar diragukan. Kuat dugaan sertifikat itu telah dipalsukan. Namun, siapa aktor di balik itu semua masih tanda tanya.

Bukan hanya pihak BTPN yang meragukan keaslian sertifikat deposito tersebut. OJK selaku lembaga negara yang mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan juga tidak menemukan nilai transaksi sebesar itu dari Pemkot Semarang di BTPN.

"Kami tidak menemukan adanya transaksi Rp 22,7 miliar. Pada November 2014 itu nggak ada transaksi di situ. Transaksi terakhir Januari 2013," kata Kepala OJK Regional 4 Wilayah Jawa Tengah

dan DIY Y Santoso Wibowo.

Dia menegaskan, keaslian sertifikat deposito hanya diketahui oleh bank yang bersangkutan. Kode sandi tertentu dalam sertifikat deposito yang dimiliki bank merupakan rahasia dan tidak mungkin dibeberkan kepada orang lain.

"Saya tidak bisa menyimpulkan palsu atau tidak, yang bisa ngerti sertifikat itu hanya banknya, karena pasti ada ciri dan kode keamanan khusus dan itu hanya diketahui oleh banknya. Jadi wajar kalau BTPN menyatakan sertifikat deposito yang dipegang Pemkot Semarang itu palsu karena mereka tahu persis," kata Santoso.

Corporate Communications Head BTPN Tbk, Eny Yuliati memaparkan, berdasarkan hasil investigasi internal, ditegaskannya bahwa dalam pencatatan bank tidak terdapat dana senilai jumlah itu dari Pemkot Semarang.

"Sehubungan dengan dokumen deposito terkait dana tersebut, yang dipegang oleh Pemkot Semarang, BTPN menegaskan bahwa BTPN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut," kata Eny. (wan/ape)